Arsip Bacaan Gratis

Bebas seperti udara! Siapapun boleh membaca, menyebarluaskan, dan memanfaatkan semua bacaan di blog ini untuk tujuan apapun.

Minggu, 05 Juli 2026

Diatur Hingga Mati

Argumen Anarkis Menentang Campur Tangan Pemerintah dalam Kehidupan Kita

Penulis: Jim Baker dan Joe Peacott

Pendahuluan

Gagasan untuk pamflet ini muncul dari diskusi kami mengenai peran berbagai aturan dan regulasi pemerintah, seperti standar kelayakan perumahan, perizinan profesi medis, pengendalian sewa, serta undang-undang pangan dan obat-obatan federal, dalam membantu atau justru menghambat kehidupan kita. Tujuan yang diklaim dari campur tangan pemerintah di semua tingkat terhadap kehidupan kita adalah melindungi mereka yang lebih lemah, lebih miskin, atau kurang mampu memperhitungkan risiko dari pemangsaan oleh mereka yang lebih kuat, lebih kaya, atau lebih licik. Sebagai anarkis, tentu kami ingin mengubah masyarakat sedemikian rupa sehingga orang-orang yang dieksploitasi, dirugikan, atau diperlakukan tidak adil oleh orang lain memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menghindari atau melepaskan diri dari situasi tersebut. Namun, sebagaimana kami jelaskan dalam tulisan-tulisan berikut, pembuatan aturan oleh pemerintah bukan saja gagal mencegah penyalahgunaan, tetapi justru semakin memperburuk keadaan bagi orang-orang yang seharusnya dibantu.

Kita sedang diatur hingga mati, baik secara harfiah maupun kiasan. Orang meninggal karena kanker atau AIDS karena mereka dilarang memperoleh obat yang dapat memperpanjang hidup oleh FDA *(Food and Drug Administration)*. Orang meninggal kedinginan di jalanan saat musim dingin, sementara pemerintah kota membatasi pasokan perumahan melalui standar kelayakan bangunan, peraturan zonasi, dan pengendalian sewa. Orang meninggal akibat komplikasi yang berkaitan dengan HIV setelah tertular melalui penggunaan jarum suntik secara bergantian, karena sejumlah pemerintah negara bagian menghalangi mereka untuk memperoleh jarum suntik steril. Semua ini terjadi karena campur tangan pemerintah menghancurkan hal yang paling penting bagi kita sebagai individu yang berdaulat, yaitu kebebasan untuk memilih bagaimana kita menjalani hidup.

Kami melihat dukungan yang luas terhadap regulasi pemerintah semacam ini di kalangan orang-orang dari berbagai pandangan politik. Namun, yang paling mengkhawatirkan bagi kami adalah sikap mereka yang mengaku menginginkan dunia yang bebas dan tanpa hierarki, tetapi justru mendukung campur tangan pemerintah semacam ini atau setidaknya enggan mengkritiknya. Kaum anarkis kapitalis dan libertarian telah lama bersuara lantang menolak "solusi-solusi" pemerintah terhadap persoalan sehari-hari. Sebaliknya, kritik terhadap campur tangan negara semacam ini hampir tidak terdengar di kalangan anarkis yang menganut model ekonomi lainnya. Karena itulah kami merasa perlu menghadirkan kritik anarkis non-kapitalis terhadap berbagai aturan pemerintah dan lembaga-lembaga regulasinya. Kami tidak beranggapan bahwa menghapus peraturan zonasi atau membubarkan FDA saja sudah cukup untuk menciptakan masyarakat yang bebas. Kami adalah anarkis; kami menginginkan penghapusan total terhadap pemerintahan beserta seluruh monopoli dan hak-hak istimewa yang dipertahankannya. Namun, satu-satunya cara agar orang belajar hidup bebas adalah dengan menjalani kehidupan yang sebebas mungkin mulai sekarang, pada saat ini juga, meskipun hanya dalam hal-hal kecil dan di tengah dunia yang secara keseluruhan masih belum bebas. Menoleransi, atau bahkan lebih buruk lagi, mendorong semakin besarnya campur tangan pemerintah dalam kehidupan kita, sekalipun dengan niat baik, hanya akan menumbuhkan ketergantungan yang lebih besar pada negara dan mengurangi kepercayaan pada diri sendiri maupun pada teman-teman kita, yang sesungguhnya merupakan satu-satunya harapan menuju dunia yang lebih bebas. Harapan kami, pamflet ini dapat mendorong kaum anarkis untuk meninggalkan sikap toleran terhadap "solusi-solusi" etatis tersebut dan beralih kepada penekanan yang lebih besar pada kebebasan individu serta inisiatif pribadi.

Mempertanyakan Regulasi

Jim Baker

Masyarakat kita tampaknya kecanduan aturan. Setiap kelompok kepentingan merasa bahwa seandainya saja mereka berhasil memberlakukan undang-undang dan regulasi yang mereka inginkan, atau mencabut aturan yang menguntungkan para pesaing mereka, kehidupan pasti akan menjadi jauh lebih baik. Namun kenyataannya tidak demikian. Semua aturan yang mengikat ini (dan setiap hari semakin banyak lagi yang akan diberlakukan) justru membuat hidup kita semakin rumit. Hippolyte Havel pernah menyindir, *"Jika Anda menginginkan sebuah alat yang dapat mengurangi kebebasan tetangga Anda, pergilah ke badan legislatif dan mintalah mereka membuatnya, kalau*

Cari Yang Anda Mau...

Telusuri

Mengenai Saya

Front Anti-Penindasan Sidoarjo

Lihat profil lengkapku

Arsip Blog

▼ 2026 (85)

► Agustus (1)

▼ Juli (9)

Anarkominimalisme

Wawancara dengan Maja T.: "Aku Melawan di Dalam Sa...

Filsafat Pembangkangan atau, Pembelaan bagi Qabil

Anti-Teisme Revolusioner; atau, Pengantar Filsafat...

Pemogokan Perut

Apakah Setan Seorang Anarkis?

Diatur Hingga Mati

Fasisme dengan Wajah Baru: Anarko-Nasionalis

Melampaui Mentalitas Kawanan

► Juni (10)

► Mei (14)

► April (22)

► Maret (24)

► Januari (5)

► 2025 (8)

Translate

Pilih Bahasa

Diberdayakan oleh Google Terjemahan

persediaannya belum tersedia." **[1]** Para legislator di setiap tingkat pemerintahan tampaknya percaya bahwa mereka dipilih untuk menambahkan sebanyak mungkin sampah hukum ke dalam kumpulan undang-undang yang sudah begitu besar dan saling bertentangan. Kini terdapat begitu banyak hukum yang mencampuri urusan pribadi, lancang, dan represif sehingga hampir setiap aspek kehidupan kita dibatasi oleh berbagai regulasi yang, dalam situasi tertentu, mengharuskan ini, melarang itu, atau sekadar membuat segala sesuatu menjadi lebih rumit. Semua ini menguntungkan kelompok elit pembuat masalah, yaitu para pengacara sekaligus legislator yang menciptakan, menafsirkan, dan memberlakukan aturan-aturan hukum yang sewenang-wenang sekaligus menguntungkan mereka sendiri.

Pada suatu masa, *Common Law*, yaitu kumpulan kebiasaan sosial yang tampak tetap tetapi sebenarnya lentur, berfungsi sebagai pembatas terhadap kekuasaan sewenang-wenang para raja dan para pembuat undang-undang. Inilah yang dimaksud ketika orang mengutip ungkapan "supremasi hukum, bukan supremasi manusia." Juri tidak dibatasi untuk sekadar mengikuti bunyi harfiah suatu undang-undang atau preseden yang buruk apabila aturan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan yang lebih luas dalam *Common Law*. Peninjauan yudisial tidak hanya berada di tangan Mahkamah Agung, tetapi juga di tangan hakim atau juri mana pun, yang dapat menjatuhkan putusan dengan menolak tuntutan tidak adil yang lahir dari aturan hukum yang sewenang-wenang. Namun sejak abad ke-19 (dan terlepas dari argumen-argumen Lysander Spooner), kita telah menyerahkan kedaulatan kita kepada negara sedemikian jauh sehingga setiap kehendak badan legislatif, betapapun tidak masuk akalnya gagasan tersebut atau betapapun merugikannya dampaknya, berubah menjadi hukum yang mengikat secara otoriter. Keadilan dalam segala maknanya disingkirkan begitu saja!

Fiksi tentang representasi demokratis tidak mampu menyembunyikan sifat menindas dari permainan hukum ini, terutama bagi kaum individualis yang menolak segala bentuk tirani, baik yang dijalankan oleh mayoritas maupun bentuk lainnya. Meskipun demikian, proses legislasi sendiri masih memberikan secercah kemungkinan bahwa usulan-usulan terburuk, baik yang dibungkus dengan idealisme palsu maupun yang benar-benar didorong oleh kepentingan yang culas, dapat diungkap, diperdebatkan, lalu ditolak. Perdebatan publik dapat menggagalkan pengesahan sebagian rancangan undang-undang atau memungkinkan pengurangan dampak buruknya. Kaum anarkis tentu saja memandang kemungkinan kecil ini dengan sikap skeptis, tetapi peluang tersebut tetap ada. Namun, ada satu bidang dalam praktik negara memberlakukan aturan yang bahkan tidak memiliki faktor penyeimbang tersebut, dan sering kali luput dari pembahasan mengenai sifat represif negara. Bidang itu adalah kerja lembaga-lembaga regulasi, yang dominasinya atas kehidupan kita terus meningkat dan sama mengkhawatirkannya dengan lembaga negara lainnya.

"Sebuah undang-undang yang panjangnya sembilan halaman dan sebuah lembaga yang terdiri atas tiga puluh dua pegawai negeri, setelah lebih dari dua ratus kali amandemen, berubah menjadi undang-undang setebal empat ratus halaman dengan birokrasi yang beranggotakan lebih dari seribu dua ratus orang. Pada akhirnya, muncullah berbagai lembaga besar yang dipenuhi para ahli, yang dalam pengertian ekonomi berfungsi sebagai perencana industri, dan dalam pengertian politik menjadi cabang pemerintahan yang tersendiri." **[2]**

Ada banyak tugas yang berusaha dijalankan oleh lembaga-lembaga regulasi, sebagaimana dicatat oleh Thomas McCraw, **[3]** tetapi di sini kita hanya akan membahas dua di antaranya: pengungkapan informasi dan peningkatan kesehatan serta keselamatan. Bidang-bidang regulasi ini sama tuanya dengan masyarakat itu sendiri. Dahulu, fungsi-fungsi tersebut dijalankan melalui dewan-dewan masyarakat yang memastikan standar komunitas dipenuhi dalam keadaan-keadaan tertentu atau menyediakan pendapat para ahli ketika pengetahuan umum tidak memadai. Sejak masa ketika pengetahuan khusus masih menjadi ranah para tetua dan dukun, manusia telah bergantung pada keahlian para spesialis. Orang perlu belajar melakukan kegiatan yang sulit atau berbahaya melalui bantuan mereka yang memiliki keahlian yang diperlukan. Sebagai contoh, aturan yang menjamin mutu dan harga roti berada di bawah kendali komunitas bahkan sebelum Abad Pertengahan.

Di dunia yang kompleks, diperlukan perlindungan terhadap benda-benda dan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan kita tanpa kita sadari, seperti produk atau praktik yang diketahui memang berbahaya secara inheren; hal-hal yang dimaksudkan untuk kebaikan tetapi kemudian terbukti berbahaya berdasarkan pengalaman, seperti asbes; atau produk dan praktik yang menjadi berbahaya karena tindakan curang orang-orang yang tidak bermoral. Kaum anarkis individualis, meskipun sering diejek sebaliknya, tidak serta-merta secara naif percaya pada kebaikan alami semua manusia. Bahkan dalam situasi sosial yang ideal, yang bebas dari pengaruh kelas dan kapital yang mendistorsi kehidupan, kelemahan manusia tetap akan menimbulkan berbagai persoalan, meskipun tentu jauh lebih sedikit daripada sekarang. **[4]** Penipuan dan pemalsuan kemungkinan akan selalu menjadi godaan, sementara bahaya-bahaya alamiah tentu akan tetap ada sebagaimana sebelumnya. Merupakan tanggung jawab suatu komunitas untuk membantu orang menghadapi persoalan-persoalan tersebut, tetapi bukan dengan sekadar melarang berbagai hal. Seorang penipu yang telah terbongkar tidak lagi dapat menipu; ia bukan lagi seorang penipu. Demikian pula, kenyataan bahwa sesuatu berpotensi berbahaya bukanlah alasan yang cukup untuk melarangnya. Justru, produk yang benar-benar efektif atau kegiatan yang memberikan kenikmatan sering kali memang mengandung risiko. Konsumenlah yang harus mempertimbangkan risiko tersebut dan mengambil tindakan pencegahan yang sesuai, bukan pemerintah yang melindungi sekumpulan orang bodoh dari segala sesuatu di luar bentuk kehidupan yang paling aman dan paling hambar.

Persoalan regulasi, yang pada pandangan pertama tampak sarat dengan otoritas yang menjijikkan bagi kaum anarkis, sebenarnya tidak sesederhana yang terlihat. Ada tak terhitung banyaknya situasi dalam kehidupan kita di mana individu menghadapi bahaya akibat ketidaktahuan, kekeliruan, atau tipu daya orang lain. Tidak seorang pun, betapapun tinggi pendidikan atau luas pengetahuannya,

dapat sepenuhnya mengandalkan pengetahuan pribadi atau akal sehatnya sendiri untuk selalu mengambil keputusan yang tepat dalam setiap keadaan. Orang membutuhkan perlindungan yang dapat diandalkan terhadap dampak penipuan, fanatisme, dan kebodohan dalam masyarakat, sekaligus sumber informasi yang tepercaya agar mereka dapat membuat pilihan secara cerdas. Sebagai contoh, regulasi yang mewajibkan produsen mencantumkan label secara lengkap pada produknya sehingga konsumen dapat mengetahui apakah produk tersebut mengandung bahan-bahan yang berbahaya, atau yang mengharuskan produsen mengungkapkan secara jujur keterbatasan maupun bahaya yang melekat pada barang dagangannya, jelas memiliki nilai yang nyata.

Mekanisme pengungkapan informasi semacam ini sepenuhnya sejalan dengan anarkisme, karena tidak perlu membatasi kebebasan produsen, sekaligus memungkinkan masyarakat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai mengenai apakah mereka akan menggunakan suatu produk atau jasa. Perlu ditegaskan bahwa tujuannya bukanlah mencegah orang membuat pilihan yang bodoh atau bahkan tidak bertanggung jawab, karena apabila memang itulah yang sungguh mereka inginkan, mereka seharusnya bebas melakukannya. Tujuannya adalah memungkinkan pilihan tersebut dibuat secara sadar dan disengaja, dengan memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan tersedia. Dari sudut pandang anarkis, tidak menjadi soal apakah seseorang sedang mempertimbangkan penggunaan narkotika rekreasional yang ilegal atau menyelam scuba di antara hiu, selama hal itu benar-benar merupakan pilihannya sendiri yang bebas. Namun, tentu lebih baik apabila mereka dapat membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang memadai, dengan memahami sepenuhnya bahaya maupun keterbatasannya, di samping kemungkinan kepuasan yang dapat diperoleh dari pengalaman tersebut. Seorang anarkis menghendaki agar tidak seorang pun dimanipulasi atau dipaksa ketika mengambil keputusan pribadi yang jujur. Informasi yang tersedia harus akurat (dan mudah dipahami), keuntungan dan kerugiannya harus dipertimbangkan secara jujur, serta kemungkinan akibatnya dijelaskan dengan jelas. Bias moral maupun pendapat praktis orang lain seharusnya tidak memiliki bobot apa pun, kecuali sejauh pengetahuan mereka mengenai suatu produk atau pengalaman memang lebih luas daripada pengetahuan kita sendiri. Pendapat semacam itulah, yang harus diupayakan seobjektif mungkin, yang kita harapkan dari para ahli.

Lantas, haruskah kita menerima suatu bentuk regulasi? Bakunin bergulat dengan persoalan peran nasihat para ahli dan otoritas dalam esainya *Authority and Science*: *"Apakah ini berarti bahwa saya menolak semua bentuk otoritas? Sama sekali tidak. Dalam urusan sepatu, saya mengakui otoritas pembuat sepatu; mengenai rumah, kanal, atau jalur kereta api, saya berkonsultasi dengan arsitek atau insinyur. Untuk pengetahuan khusus semacam itu, saya meminta pendapat seorang 'cendekiawan'. Namun saya tidak membiarkan arsitek maupun 'cendekiawan' tersebut memaksakan otoritas mereka kepada saya. Saya mendengarkan mereka secara sukarela dan dengan segala penghormatan yang layak diberikan kepada kecerdasan serta pengetahuan mereka, sambil tetap mempertahankan hak saya yang tak terbantahkan untuk mengkritik dan menolak pendapat mereka... Saya tidak mengakui adanya otoritas yang tidak mungkin salah, bahkan dalam persoalan-persoalan khusus..."* **[5]** Bakunin juga mengamati bahwa kita semua tunduk pada hukum-hukum alam, tetapi tidak harus tunduk pada ilmu pengetahuan manusia, yang selalu merupakan penafsiran terhadap hukum-hukum tersebut dan karena itu tidak pernah sempurna serta selalu bersifat tentatif. Hukum-hukum alam akan tetap berlaku, apa pun yang kita pilih untuk percayai, dan nasihat para ahli dapat membantu kita menghindari konsekuensi yang tak terelakkan dari suatu kekeliruan. Namun, yang terpenting adalah bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan individu yang mencari pengetahuan itu sendiri, bukan di tangan para ahli. Ketika kita menempatkan diri di bawah otoritas seorang ahli, kita jatuh ke dalam jurang penghambaan. Di jurang itulah lembaga-lembaga regulasi berusaha mengurung kita. Dengan membuat kita bergantung pada kekuasaan para ahli dan otoritas, mereka memperbudak kita semua. Akibatnya, yang berlaku adalah kekuasaan manusia, bukan supremasi hukum, dalam pengertian paling buruk dari pepatah lama tersebut.

Saat ini, lembaga-lembaga regulasi menjalankan dua fungsi sekaligus: memberikan nasihat dan memaksa. Mereka bukan hanya memberi tahu kita mengenai standar-standar yang menurut para ahli dapat diterima, tetapi juga memaksa setiap orang, suka atau tidak, untuk mematuhinya. Hal ini mungkin tampak bermanfaat ketika yang dibatasi adalah kapitalis industri raksasa yang rakus (meskipun terlalu sering lembaga regulasi justru dikooptasi oleh kapitalis yang seharusnya mereka awasi). Tentu saja, contoh bagaimana industri kayu memperlakukan hutan-hutan tua di Amerika Serikat membuat kita semua berharap ada sesuatu yang "mengatur", yakni menghentikan penghancuran yang tidak dapat dipulihkan itu. Namun, di sisi lain, bisa saja seorang petani kecil yang berada di ambang kesulitan ekonomi justru dipaksa gulung tikar karena keputusan birokrasi yang sama menetapkan bahwa ia tidak boleh menebangi kawasan semak belukar berusia tujuh puluh tahun di lahannya. Bagi seorang birokrat atau penganut absolutisme ekologis, pohon adalah pohon, dan persoalannya selesai sampai di situ. Akan tetapi, kebanyakan orang lebih memilih agar mereka yang kaya dan tidak bertanggung jawab dikenai beban yang jauh lebih besar, terutama dalam bentuk biaya, sebagai upaya untuk mencegah tindakan mereka, sementara orang-orang kecil diperlakukan dengan lebih bijaksana dan adil. Selain itu, setiap perkara seharusnya diperiksa secara menyeluruh berdasarkan dampaknya yang nyata, bukan sekadar berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang bersifat hipotetis, sebelum mereka dilarang melakukan sesuatu yang sebenarnya bermanfaat bagi diri mereka. Terdapat perbedaan yang nyata dalam hal skala, maksud, dan dampak antara kedua kasus tersebut, meskipun keduanya dihambat oleh regulasi yang sama persis. Inilah yang sering disebut sebagai "persamaan di hadapan hukum." Solusi yang paling sederhana, yakni tidak mengatur keduanya sama sekali, justru menimbulkan persoalan lain, sebagaimana ditunjukkan oleh contoh industri kayu, industri minyak, dan berbagai industri lainnya.

Dalam praktiknya, pihak yang besar, yang didorong oleh motif keserakahan dan memiliki sumber daya untuk memainkan permainan hukum, memiliki peluang besar untuk mengakali bahkan regulasi

yang paling ketat sekalipun. Sebaliknya, orang-orang kecil, sekalipun secara hukum memiliki peluang untuk membela diri, sering kali tetap terhalang oleh mahalnya biaya pembelaan hukum (atau sekadar oleh kerumitan regulasi yang ditebarkan para regulator di hadapan mereka). Pada akhirnya, proses ini hanyalah cerminan dari ketimpangan yang lebih besar dalam masyarakat kita, sehingga lebih banyak menindas daripada membantu individu. Bahkan seandainya lembaga-lembaga regulasi itu efektif dalam hal-hal lainnya, ketimpangan kelas dan pendapatan ini tetap akan memastikan bahwa pengaruh mereka bersifat merugikan. Namun, telah diakui secara luas bahwa regulasi negara bagian maupun federal bukan hanya gagal mencapai tujuan yang mereka nyatakan sendiri, tetapi juga telah berkembang menjadi rimba birokrasi yang sedemikian rumit sehingga justru menghambat solusi-solusi yang semula hendak mereka wujudkan.

Salah satu penyebab utama kegagalan tersebut adalah kekakuan yang melekat dalam penerapan setiap regulasi. Inilah kelemahan khas dari setiap bentuk otoritas. Para pejabat negara menjadikan aturan-aturan sewenang-wenang sebagai semacam fetisisme dan menjadikan konsistensi yang membabi buta sebagai sebuah keharusan, sehingga sarana akhirnya dianggap lebih penting daripada tujuan. Setelah suatu aturan ditetapkan, aturan itu akan terus diterapkan bahkan ketika tujuan yang semula hendak dicapai jelas-jelas telah diputarbalikkan. Seandainya suatu lembaga menangani setiap perkara dengan tujuan mencapai hasil yang adil dan efektif melalui cara-cara yang masuk akal, alih-alih menjadikannya kesempatan untuk memaksa kenyataan agar sesuai dengan tuntutan kaku regulasi mereka, mungkin masih ada sedikit manfaat yang dapat dihasilkan. Sekelompok penengah *(arbiters)*, seperti yang digambarkan oleh Kropotkin, **[6]** yang benar-benar bertujuan menyelesaikan persoalan, bukan menciptakannya, mungkin dapat bekerja dengan baik. Namun, tangan mati birokrasi negara membuat hal itu mustahil. Akibatnya, seluruh proses berubah menjadi permainan tanpa jiwa, sama seperti permainan hukum para pengacara, di mana hasil akhirnya dikorbankan demi kerumitan prosedur. Ketiadaan penilaian yang sungguh-sungguh menyebabkan aturan-aturan yang keliru diterapkan secara sewenang-wenang dan bersifat menghukum, sehingga menghasilkan penyelesaian yang hanya memenuhi standar paling rendah, padahal semuanya dicapai melalui upaya dan biaya yang besar namun sama sekali tidak diperlukan.

Dengan demikian, proses regulasi, sebagaimana dikelola oleh negara, bukan hanya bersifat mencampuri urusan pribadi, memaksa, dan tidak adil, tetapi juga tidak efektif. **[7]** Bahkan, sering kali proses tersebut justru memperburuk keadaan yang semula ingin diperbaikinya. Karena itu, kita sampai pada kesimpulan bahwa regulasi (baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun bentuk lainnya) memang tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu, apa yang harus dilakukan? Jawaban sederhana kaum libertarian adalah: "Hapuskan regulasi!" Hentikan saja seluruh proses tersebut dan biarkan segala sesuatu menata dirinya sendiri. Kaum anarkis filosofis mungkin akan menyetujuinya, karena gagasan itu sejalan dengan prinsip-prinsip anarkisme. Akan tetapi, mereka yang menginginkan masyarakat yang dapat direvolusionerkan secara nyata, bukan sekadar masyarakat utopis yang mustahil diwujudkan, mungkin akan ragu. Meskipun regulasi memang tidak berhasil, persoalan-persoalan yang hendak dipecahkannya tetap nyata adanya. Karena itu, kita harus menolak bukan hanya regulasi itu sendiri, tetapi juga pendekatan *laissez-faire* yang membiarkan orang-orang yang tidak bermoral maupun mereka yang tersesat terus menghalangi kebutuhan dan hak-hak orang lain.

Penolakan kaum anarkis individualis terhadap setiap tindakan yang bersifat memaksa dan mencampuri urusan pribadi (meskipun tidak selalu terhadap korporasi, walaupun korporasi itu sendiri mungkin terdiri atas individu-individu yang berasosiasi secara sukarela) secara implisit juga berarti menolak sistem lama berupa pengendalian oleh komunitas yang mengatur berbagai hal sebelum munculnya negara modern. Bahkan, seruan-seruan mengenai "komunitas" dan "konsensus" yang kini kerap dikemukakan oleh berbagai kalangan reformis, alih-alih menandai kebebasan individu, justru menyerukan kembalinya penindasan di tingkat lokal serta intoleransi sempit yang selama beberapa generasi telah diperangi oleh kaum anarkis dan para pemberontak lainnya sebagai "mentalitas kota kecil" dan moralitas Victoria yang menindas. Sebagaimana sering terjadi, kaum "radikal" semacam ini akhirnya tidak lagi dapat dibedakan dari kaum reaksioner sejati, sebagaimana terlihat pada monster Dworkin/Comstock. Pemaksaan dan campur tangan yang didorong oleh prasangka, terutama ketika dibungkus dengan niat baik, harus dihindari dengan sangat hati-hati. Sebaliknya, jalan keluarnya mungkin terletak pada pemisahan dua fungsi dalam sistem regulasi. Fungsi pengungkapan informasi seharusnya diambil alih oleh kelompok-kelompok sukarela yang dapat menguji, menyelidiki, dan menganalisis berbagai produk maupun kegiatan, lalu menerbitkan laporan yang seobjektif mungkin untuk masyarakat. Keberpihakan yang tak terelakkan dalam laporan-laporan tersebut akibat sudut pandang kelompok penyelidik dapat dikurangi melalui pernyataan yang jujur mengenai posisi kelompok itu sendiri, serta dengan adanya beberapa organisasi pengujian yang berjalan secara paralel, namun tidak bersifat "resmi" maupun saling bersaing. Adapun praktik regulasi beserta penegakannya yang bersifat memaksa sebagai tindak lanjut dari hasil penyelidikan tersebut seharusnya dihapuskan sama sekali. Individulah yang kemudian bertanggung jawab memanfaatkan laporan dari satu atau beberapa kelompok pengungkapan informasi tersebut agar dapat memberikan persetujuan berdasarkan informasi yang memadai. Tidak seorang pun memiliki hak untuk menyensor atau menghalangi interaksi bebas antarindividu.

Di sisi lain, setiap kali muncul bahaya yang nyata dan langsung sebagai akibat dari niat ataupun tindakan individu maupun kelompok (termasuk korporasi), individu dan kelompok lain harus tetap memiliki tanggung jawab untuk membela diri terhadap tindakan yang bersifat menyerang atau mencampuri hak mereka, bahkan sampai pada kesiapan mengambil tindakan pencegahan apabila keadaan memang mengharuskannya. Sekilas, pandangan ini mungkin tampak sangat menyimpang dari prinsip-prinsip anarkisme individualis dan doktrin non-intervensi. Namun sesungguhnya tidak demikian. Jawabannya bukanlah seperangkat "undang-undang" atau regulasi yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan tanggapan yang jujur dan langsung dari individu atau kelompok terhadap ancaman yang segera terjadi atau terhadap pelanggaran yang secara jelas bersifat berat dan/atau

tidak dapat dipulihkan terhadap seseorang atau suatu wilayah (termasuk, misalnya, pembakaran atau perusakan ekologis terhadap lingkungan tempat hidup suatu masyarakat). Ketika situasi semacam itu muncul (dan tentu bijaksana apabila tersedia mekanisme konsultasi tertentu untuk mencegah kepanikan yang berlebihan seperti kisah *Chicken Little*), tanggapan yang diberikan harus tegas dan langsung. Benjamin Tucker menjelaskan persoalan ini dengan sangat baik: *"Kebebasan dalam segala keadaan, demikian kata kaum anarkis. Jangan gunakan kekerasan kecuali terhadap pihak yang melakukan penyerangan; dan dalam kasus-kasus ketika sulit menentukan apakah orang yang dituduh benar-benar merupakan penyerang atau bukan, tetap jangan gunakan kekerasan, kecuali apabila kebutuhan untuk mengambil keputusan seketika begitu mendesak sehingga kita harus melakukannya demi menyelamatkan diri kita sendiri [atau, sebagaimana dalam kasus anak-anak maupun individu-individu tertentu yang lebih lemah dan tidak mampu melindungi diri mereka sendiri]. **[8]** Dan dalam sedikit kasus ketika kita memang harus menggunakan kekerasan, lakukanlah secara terus terang dan jujur, dengan mengakuinya sebagai suatu kebutuhan, tanpa berusaha menyelaraskan tindakan tersebut dengan cita-cita politik apa pun atau membangun teori yang dibuat-buat mengenai suatu negara atau kolektivitas yang memiliki hak istimewa dan kewenangan lebih tinggi daripada individu maupun kelompok individu, serta dibebaskan dari prinsip-prinsip etika yang justru diharapkan dipatuhi oleh setiap individu."* **[9]**

Regulasi sebagai regulasi, sebagaimana diberlakukan oleh negara kepada kita, tidak dapat diterima. Bahkan regulasi lebih bermasalah daripada banyak undang-undang, yang setidaknya masih melalui proses perdebatan politik dan menyediakan jalur hukum untuk mengajukan keberatan. Regulasi berada di bawah kendali sewenang-wenang dan sering kali berubah-ubah sesuai kehendak para pejabat rendahan (seperti pekerja sosial, inspektur kesehatan, dan sebagainya). Mereka hampir selalu dapat menemukan suatu "pelanggaran" dalam situasi apa pun, tergantung apakah mereka kebetulan tidak menyukai seseorang, ingin memamerkan secuil kewenangan yang mereka miliki, atau sekadar sedang bertengkar dengan pasangan mereka pada pagi itu. Banyaknya aturan dalam berbagai kode regulasi hampir menjamin bahwa setiap keadaan yang sebenarnya normal pun dapat dianggap sebagai pelanggaran. Begitu suatu "pelanggaran" ditetapkan, seluruh kekuasaan negara yang begitu menindas akan diarahkan kepada individu atau kelompok yang malang tersebut. Dalam keadaan seperti itu, memperoleh pemulihan, atau bahkan sekadar kesempatan untuk didengar secara adil, jauh lebih sulit daripada dalam perkara pidana biasa. Salah satu alasannya adalah bahwa hampir selalu ada pelanggaran terhadap satu aturan atau aturan lainnya. Apakah keadaan yang dimaksud benar-benar berbahaya atau keliru, atau sekadar tampak tidak sesuai, sama sekali tidak menjadi persoalan; yang diperhitungkan adalah aturannya, bukan kenyataan yang sebenarnya.

Sebagai contoh, kode bangunan yang sangat represif bukan hanya membatasi kebebasan para pembangun yang berani bereksperimen, kreatif, atau sekadar memiliki selera yang baik ("tetapi itu tidak sesuai dengan kode bangunan!!!"), melainkan juga telah menciptakan kelangkaan perumahan murah yang serius, yang turut menyebabkan persoalan "tunawisma" yang kita hadapi saat ini. Memang terdapat banyak faktor yang berperan, tetapi salah satu yang utama adalah pemaksaan tanpa pikir panjang atas standar hidup borjuis kepada semua orang. Sebagaimana dikemukakan oleh James Stevens Curl ketika membahas persoalan perumahan di Oxford: *"Penyematan istilah 'kawasan kumuh' itu sendiri mencerminkan cara pandang kelas menengah terhadap rumah-rumah deret, di mana ukuran-ukuran yang berlaku bagi lingkungan mewah diterapkan pada keadaan yang sederhana."* Hal tersebut, ditambah dengan semboyan yang menempatkan "keselamatan" di atas segala pertimbangan lain (artinya, lebih baik tidak memiliki rumah sama sekali daripada memiliki rumah yang suatu saat, dalam keadaan tertentu, mungkin tidak aman), telah menjadi faktor penting yang menghancurkan berbagai cara yang selama berabad-abad digunakan oleh masyarakat miskin untuk memperoleh tempat berlindung. Harus tunduk pada sekian banyak bentuk penindasan semacam ini demi hasil yang akhirnya diperoleh sungguh tidak masuk akal. Pengorbanannya jelas tidak sebanding dengan manfaatnya. Meskipun persoalan-persoalan sosial yang hendak diatasi melalui regulasi memang nyata, obat yang ditawarkan tampaknya justru lebih buruk daripada penyakitnya. Kita harus mengakui bahwa sebaik apa pun niat yang melatarbelakanginya, kenyataan tersebut tidak dapat disangkal. Seandainya liberalisme benar-benar bekerja sebagaimana yang dicita-citakan, mungkin saya tidak akan menjadi seorang anarkis. Namun, dalam keadaan yang ada sekarang, satu-satunya jawaban terhadap pertanyaan, "Haruskah kita diatur?", adalah "tidak."

Deregulasi Pelayanan Kesehatan

Joe Peacott

Pendahuluan

Sama seperti pemerintah beserta para pendukungnya menganggap diri mereka paling berwenang menentukan bagaimana dan di mana kita harus tinggal, atau jenis obat-obatan rekreasional apa yang boleh kita gunakan, lalu memberlakukan berbagai undang-undang untuk mengendalikan aspek-aspek tersebut dalam kehidupan kita, negara juga menempatkan dirinya sebagai penjaga kesehatan masyarakat dan mengatur di mana, bagaimana, serta dari siapa kita boleh memperoleh pelayanan kesehatan. Melalui berbagai undang-undang beserta lembaga-lembaga pengaturnya, pemerintah menentukan jenis pelayanan kesehatan apa yang boleh diberikan, siapa yang berhak memberikannya, di mana para penyedia layanan tersebut boleh merawat pasien, serta di mana, dari siapa, dan dalam kondisi apa kita boleh membeli obat-obatan. Regulasi-regulasi ini diklaim bertujuan melindungi pengguna pelayanan kesehatan agar tidak menerima perawatan yang tidak kompeten, ceroboh, atau berbahaya, sekaligus mencegah mereka membahayakan diri sendiri dengan menggunakan obat-obatan tanpa terlebih dahulu meminta nasihat para ahli.

Namun, hasil utama dari pengendalian negara melalui regulasi terhadap praktik pelayanan kesehatan bukanlah perlindungan terhadap kesehatan para pengguna pelayanan kesehatan, melainkan perlindungan terhadap monopoli pasar yang dinikmati para tenaga kesehatan, produsen obat, dan penyedia layanan kesehatan lainnya yang telah memperoleh persetujuan negara. Monopoli yang ditegakkan pemerintah ini bukan saja menyebabkan biaya pelayanan dan obat-obatan menjadi sangat mahal sehingga para penyedia layanan dan perusahaan farmasi meraup keuntungan yang luar biasa besar, tetapi juga sangat membatasi ragam pelayanan kesehatan dan obat-obatan yang tersedia bagi masyarakat. Banyak pengkritik beranggapan bahwa solusi atas berbagai persoalan dalam sistem pelayanan kesehatan adalah pemerintah harus mengaturnya dengan lebih ketat dan menanggung pembiayaannya melalui semacam sistem pelayanan kesehatan nasional. Saya tidak sependapat.

Dalam tulisan ini saya berpendapat, dan akan berusaha menunjukkan, bahwa masyarakat akan memperoleh pelayanan dan produk kesehatan yang lebih mudah diakses, lebih beragam, lebih murah, dan lebih bermutu apabila pasar pelayanan kesehatan tidak diatur oleh pemerintah mana pun. Mempertanyakan hak negara untuk mengendalikan pelayanan kesehatan, serta menuntut kebebasan untuk menentukan sendiri bagaimana, di mana, dan dengan siapa kita ingin merawat tubuh kita (sebagaimana kita menuntut kebebasan seksual dan hak aborsi), merupakan tantangan mendasar terhadap anggapan bahwa negara dapat mengurus kita lebih baik daripada kita mengurus diri kita sendiri. Deregulasi pelayanan kesehatan, bahkan jika masih berlangsung di tengah kendali negara atas bidang-bidang kehidupan lainnya, bukan hanya akan meningkatkan kesehatan dan memperluas kebebasan kita dalam bidang ini. Deregulasi juga dapat menjadi contoh pendekatan non-negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan lain yang kita hadapi, dan mungkin menjadi salah satu langkah menuju masyarakat yang sepenuhnya bebas dari campur tangan negara.

Deregulasi Dokter: Runtuhnya Sistem Perizinan Profesi

Salah satu cara terpenting pemerintah mencampuri pasar pelayanan kesehatan adalah melalui sistem perizinan profesi yang diberlakukan negara terhadap dokter, perawat, dan penyedia pelayanan kesehatan lainnya. Meskipun negara dan kalangan profesional mengklaim bahwa perizinan diperlukan untuk melindungi masyarakat, pada kenyataannya sistem tersebut terutama melindungi para tenaga kesehatan itu sendiri dari persaingan. Secara historis, tuntutan agar diberlakukannya perizinan bukan datang dari para pengguna pelayanan kesehatan, melainkan dari para praktisi yang ingin memperoleh izin tersebut.

Perizinan profesi yang diwajibkan negara menjamin monopoli di pasar pelayanan kesehatan bagi mereka yang berhasil meyakinkan negara bahwa merekalah penyembuh resmi dalam suatu masyarakat. Undang-undang perizinan semacam ini mengkriminalisasi praktik kedokteran (atau keperawatan, atau fisioterapi, dan sebagainya) oleh siapa pun yang tidak memperoleh izin resmi dari negara. Apa yang dianggap sebagai praktik profesi tersebut, serta persyaratan untuk memperoleh izin, tentu saja ditentukan oleh dewan-dewan regulator yang anggotanya terdiri atas para profesional berizin itu sendiri. Dengan secara efektif melarang jenis-jenis penyedia pelayanan kesehatan lainnya, serta mengatur kegiatan mereka yang telah memperoleh izin, berbagai profesi kesehatan mampu membatasi persaingan di bidangnya masing-masing, sehingga meningkatkan status, pendapatan, serta kekuasaan sosial dan politik mereka.

Dokter konvensional di Amerika Serikat seluruhnya merupakan dokter *allopathic* (MD) atau dokter *osteopathic* (DO). Akan tetapi, pengobatan *allopathic* dan *osteopathy* bukanlah satu-satunya model pelayanan kesehatan. Berbagai aliran seperti homeopathy, naturopathy, pengobatan tradisional Tiongkok dan akupunktur, serta *Christian Science*, menawarkan model penyembuhan dan pemeliharaan kesehatan yang berbeda, dan telah lama dianut oleh banyak orang, baik di Amerika Serikat maupun di berbagai belahan dunia. Sebelum munculnya undang-undang perizinan profesi kedokteran, terdapat beragam aliran dan praktisi pelayanan kesehatan di negara tersebut. Namun, praktik berbagai bentuk pelayanan kesehatan yang disebut sebagai "pengobatan alternatif" itu telah dibatasi secara ketat oleh monopoli yang didukung negara dan dikuasai oleh para dokter MD dan DO, yang disebut sebagai praktisi "ilmiah". Undang-undang perizinan bagi perawat, fisioterapis, dan tenaga kesehatan lain yang bukan dokter juga didasarkan pada pandangan kedokteran "ilmiah" tersebut.

Berbagai tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik sangat menjaga wilayah profesinya dan dengan senang hati melibatkan negara setiap kali ada pendatang baru yang menantang monopoli mereka. Sebagai contoh, di Massachusetts, *Board of Registration in Nursing* menjatuhkan sanksi kepada seorang bidan awam yang mendampingi persalinan di rumah dengan mencabut izin praktik keperawatannya (ia juga merupakan seorang perawat terdaftar atau *Registered Nurse* (RN)), sehingga ia tidak lagi dapat bekerja sebagai perawat. Tindakan tersebut hanyalah bagian dari upaya yang lebih luas dari kalangan perawat untuk menggantikan praktik kebidanan awam yang saat itu tidak diatur dengan praktik bidan perawat *(nurse-midwifery)* yang berizin dan dibatasi. Seperti yang dapat diduga, upaya-upaya untuk membatasi penyediaan layanan kesehatan semacam ini selalu dibenarkan dengan dalih melindungi "kesehatan masyarakat."

Lalu, apa dampak nyata dari undang-undang dan regulasi mengenai perizinan tersebut terhadap pelayanan kesehatan? Pertama, peraturan-peraturan itu secara drastis membatasi keberagaman penyedia layanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat. Meskipun para praktisi pengobatan alternatif masih diizinkan berpraktik di beberapa tempat, berbagai pembatasan ketat dikenakan terhadap kegiatan mereka. Bahkan, sekadar memberikan nasihat kepada seorang pasien dapat dianggap sebagai "praktik kedokteran" yang melanggar hukum apabila dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki izin resmi. Selain itu, perusahaan asuransi, yang berusaha melindungi

keuntungan mereka dengan meminimalkan risiko dan menghindari kemungkinan tuntutan hukum, pada umumnya mengikuti rekomendasi para ahli yang disetujui pemerintah dan enggan menanggung biaya pelayanan yang tidak diberikan oleh praktisi medis konvensional. Tidak diragukan bahwa kedokteran ilmiah telah membantu menyembuhkan banyak orang, dan bahwa antibiotik serta obat pereda nyeri telah memberikan sumbangan besar bagi kesejahteraan banyak orang. Namun, berbagai bentuk pelayanan kesehatan alternatif juga telah membantu banyak orang, dan setiap individu seharusnya bebas memilih jenis pelayanan kesehatan yang mereka inginkan.

Selain melindungi para praktisi kedokteran ilmiah dari persaingan pihak luar, undang-undang perizinan juga memungkinkan mereka membatasi jumlah praktisi di bidang mereka sendiri. Dengan mengatur persyaratan perizinan, dewan kedokteran yang dikendalikan oleh para dokter dapat membatasi jumlah lulusan sekolah kedokteran melalui persyaratan akreditasi terhadap sekolah-sekolah kedokteran, yang sekali lagi diawasi oleh para dokter berizin itu sendiri. Demikian pula, dewan kedokteran menetapkan persyaratan yang sangat ketat bagi lulusan sekolah kedokteran luar negeri demi semakin melindungi diri mereka dari persaingan. Kelangkaan buatan yang tercipta akibat pembatasan jumlah lulusan kedokteran ini meningkatkan permintaan terhadap setiap praktisi, sekaligus memungkinkan para dokter mengenakan biaya yang sangat tinggi atas jasa mereka yang langka. Mengizinkan setiap orang membuktikan kompetensinya di bidang yang mereka tekuni, tanpa memandang latar belakang pendidikan formalnya, serta menghapus standar ganda yang diterapkan terhadap lulusan sekolah kedokteran luar negeri, memang tidak akan menyelesaikan seluruh persoalan akses yang ditimbulkan oleh sistem perizinan. Namun, setidaknya langkah tersebut akan membantu meningkatkan jumlah dokter konvensional yang tersedia sekaligus menurunkan biaya pelayanan kesehatan.

Sebagian dokter berpendapat bahwa mereka perlu mengenakan biaya yang sangat tinggi karena harus menanggung utang besar setelah menyelesaikan pendidikan kedokteran. Memang ada benarnya argumen tersebut. Namun, jika melihat gaya hidup sebagian besar dokter, jelas bahwa mereka memperoleh penghasilan yang cukup bukan hanya untuk melunasi utang pendidikan mereka, tetapi juga untuk menikmati taraf hidup yang sangat nyaman. Solusi atas mahalnya biaya pendidikan bukanlah membebankan biaya tersebut kepada pasien ataupun kepada pihak ketiga (terutama para pembayar pajak). Penghapusan sistem perizinan akan menghapus pula sistem akreditasi sekolah kedokteran yang dikendalikan oleh para dokter. Hal ini akan membuka peluang berdirinya lebih banyak sekolah kedokteran, program pelatihan, maupun berbagai bentuk pemagangan, sehingga biaya pendidikan tenaga kesehatan, baik bagi dokter yang menjalankan kedokteran ilmiah maupun praktisi pengobatan alternatif, akan menjadi lebih terjangkau.

Para penentang penghapusan sistem perizinan berpendapat bahwa tanpa regulasi negara terhadap pelayanan kesehatan, orang-orang yang tidak kompeten dan para dukun palsu akan memanfaatkan konsumen yang kurang memahami persoalan kesehatan. Mereka mengklaim bahwa pengawasan semacam itu menjamin adanya pendidikan yang memadai, praktik yang kompeten, serta jalur hukum bagi korban ketidakmampuan atau penipuan, melalui pengaturan mengenai siapa yang boleh menjalankan praktik kedokteran dan penyediaan mekanisme untuk menjatuhkan sanksi kepada dokter yang melakukan pelanggaran. Akan tetapi, sistem perizinan bukanlah cara terbaik, apalagi satu-satunya cara, untuk menjamin mutu penyedia layanan kesehatan. Bukan hanya karena para profesional berizin, melalui dewan registrasi mereka, sering kali justru melindungi rekan-rekan sejawatnya dari hukuman ketika mereka merugikan pasien, tetapi juga karena gugatan hukum terhadap dokter, terutama yang diajukan oleh orang-orang miskin dan mereka yang berpendidikan rendah, sering kali sulit diajukan dan bahkan lebih sulit lagi dimenangkan di pengadilan.

Cara yang lebih baik untuk menilai penyedia layanan kesehatan adalah menggunakan metode yang lazim dipakai konsumen ketika memilih berbagai jasa lainnya, yaitu melalui rekomendasi dari mulut ke mulut dan lembaga informasi swasta. Dokter yang buruk, sebagaimana restoran yang buruk, akan menjadi bahan pembicaraan dan ulasan para pelanggan yang tidak puas, sehingga mereka akan dipaksa memperbaiki pelayanannya atau akhirnya gulung tikar. Selain itu, individu maupun perusahaan swasta dapat mengambil peran dalam mengevaluasi dan memberi penilaian terhadap para dokter, sebagaimana yang dilakukan *Consumers Union* melalui majalahnya, *Consumer Reports*. *People's Medical Society* bahkan telah menyediakan direktori dokter berdasarkan negara bagian yang disusun dari rekomendasi para anggotanya. Layanan lain, seperti *Planetree Health Resource Center* di San Francisco, menyediakan berkas informasi bagi para pengguna layanan kesehatan yang memuat berbagai keterangan mengenai penyakit maupun persoalan kesehatan, baik yang bersumber dari jurnal ilmiah kedokteran maupun dari sumber-sumber alternatif. Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang diperlukan untuk menilai kompetensi dan kejujuran dokter yang mereka pilih.

Penghapusan pengawasan negara terhadap para penyedia layanan kesehatan memang dapat meningkatkan risiko bagi orang yang mencari tenaga kesehatan. Masyarakat tidak lagi dapat bergantung pada perlindungan pemerintah, yang selama ini pun sebenarnya tidak memadai, untuk melindungi mereka dari praktisi yang tidak kompeten atau berbahaya. Pasar bebas dalam pelayanan kesehatan menuntut setiap orang lebih menjaga dirinya sendiri daripada mengandalkan negara untuk melindunginya. Namun, ketidakpastian baru yang muncul dalam sistem semacam itu, beserta meningkatnya tuntutan akan tanggung jawab pribadi, akan diimbangi oleh kebebasan yang jauh lebih besar dalam memilih berbagai pilihan layanan kesehatan. Pertukaran tersebut layak diterima, meskipun disertai risiko yang lebih besar serta kebutuhan akan waktu dan usaha tambahan untuk memastikan mutu pelayanan kesehatan dalam sistem yang tidak diatur oleh negara.

Deregulasi Obat-obatan

Ketentuan dalam undang-undang dan regulasi perizinan yang, lebih dari aturan lainnya, memaksa begitu banyak orang untuk menggunakan jasa dokter berlisensi adalah aturan yang membatasi kewenangan meresepkan berbagai jenis obat hanya kepada dokter MD dan DO (serta dalam beberapa kasus, perawat praktisi *(nurse practitioner)* dan asisten dokter *(physician assistant)*). Ketidakmampuan memperoleh obat tanpa resep dokter menghalangi orang untuk mengobati dirinya sendiri dan sekaligus meningkatkan pendapatan para dokter, karena masyarakat dipaksa berkonsultasi dengan mereka sebelum dapat memperoleh pengobatan yang ingin digunakan. Persyaratan resep ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pembatasan terhadap pembuatan, penjualan, dan penggunaan obat-obatan di Amerika Serikat. Agar pelayanan kesehatan di negara ini benar-benar terbebas dari campur tangan negara, seluruh aturan dan regulasi yang membatasi akses terhadap obat-obatan harus dihapuskan.

Seperti halnya argumen yang digunakan untuk membenarkan sistem perizinan profesi, alasan utama di balik banyak undang-undang pembatasan obat adalah keyakinan bahwa negara merupakan instrumen yang tepat untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan bahwa pasar bebas obat-obatan akan membuat para pengguna layanan kesehatan menghadapi tingkat risiko yang dianggap tidak dapat diterima. Oleh karena itu, selain mewajibkan penggunaan obat berada di bawah pengawasan dokter, negara juga mengatur siapa yang boleh memproduksi obat, bagaimana obat harus diuji, kapan obat boleh dipasarkan, serta perusahaan mana yang diperbolehkan memproduksi obat tertentu. Akibat dari berbagai peraturan tersebut, masyarakat hanya memiliki pilihan obat yang terbatas, harus membayar harga yang sangat mahal, dan tidak dapat memperoleh obat tanpa resep dokter, yang semuanya diklaim dilakukan demi kepentingan masyarakat sendiri.

Akibat peraturan FDA *(Food and Drug Administration)*, banyak obat tidak tersedia di Amerika Serikat. Sejumlah orang meninggal karena tidak dapat memperoleh *pentamidine* untuk mencegah pneumonia yang berkaitan dengan AIDS, sementara berbagai obat potensial lain untuk mengatasi AIDS juga tetap tidak diizinkan beredar oleh FDA. Lembaga ini juga menghalangi masyarakat memperoleh *THA*, obat yang telah terbukti bermanfaat bagi banyak penderita penyakit Alzheimer dan telah tersedia di sejumlah negara lain. Selain itu, perempuan yang ingin melakukan aborsi di Amerika Serikat dipaksa menjalani prosedur bedah karena FDA melarang penggunaan *RU-486*, obat untuk menggugurkan kandungan yang telah tersedia di berbagai negara lain. Akibatnya, orang-orang di negara ini dibiarkan menderita dan meninggal, atau dipaksa menghadapi risiko komplikasi akibat pembedahan, sementara FDA mengklaim sedang "melindungi kepentingan mereka."

Setelah suatu obat diizinkan beredar oleh FDA, biasanya satu perusahaan farmasi diberikan hak paten sehingga memperoleh monopoli di pasar. Monopoli yang didukung negara ini menyebabkan harga obat menjadi jauh lebih tinggi daripada yang semestinya dan, akibatnya, membatasi akses bagi banyak orang yang tidak mampu membelinya. Sekali lagi, kesehatan masyarakat dirugikan akibat kebijakan FDA.

Perusahaan-perusahaan farmasi berpendapat bahwa tanpa hak paten dan monopoli pasar, mereka tidak akan mampu membiayai penelitian yang mahal untuk mengembangkan obat-obatan baru. Namun, sebagian besar biaya pengembangan obat justru muncul karena aturan-aturan FDA. Menghapus FDA akan secara signifikan mengurangi biaya untuk membawa obat ke pasar. Perusahaan farmasi tetap akan mengembangkan obat baru karena obat baru tetap menghasilkan keuntungan, baik ada monopoli maupun tidak. Fakta bahwa monopoli bukan syarat untuk memperoleh keuntungan dalam industri farmasi dapat dilihat dari banyaknya versi generik yang segera muncul begitu masa paten suatu obat berakhir, serta dari pasar obat bebas yang sangat menguntungkan, padahal sebagian besar obat tersebut tidak dipatenkan.

Selain obat-obatan, FDA juga mengatur berbagai alat kesehatan. Aturan-aturan mengenai penggunaan alat tersebut juga bertentangan dengan kebebasan individu dalam menentukan pilihan layanan kesehatan. Misalnya, ketika FDA menyerukan moratorium terhadap penggunaan implan payudara berbahan silikon bagi perempuan, lembaga itu pada dasarnya melarang orang yang menginginkan implan tersebut untuk memutuskan sendiri apakah mereka bersedia menerima risiko kecil terjadinya komplikasi demi memperoleh bentuk tubuh yang mereka inginkan. Seperti yang ditulis Margery Eagan dalam Boston Herald: *"Beberapa hari lalu saya mewawancarai Lora Brody, seorang perempuan dari Newton yang menggunakan implan silikon setelah menjalani mastektomi dan mengaku 'sangat puas' dengan hasilnya. Siapakah pemerintah, tanya Brody, sehingga merasa berhak mengatakan bahwa dirinya tidak mampu menilai risiko silikon dan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri?"* Sikap yang meremehkan kemampuan individu untuk mengambil keputusan bagi dirinya sendiri inilah yang menjadi dasar campur tangan pemerintah dalam bidang layanan kesehatan.

Para pendukung campur tangan pemerintah berpendapat bahwa penghapusan regulasi akan menyebabkan obat-obatan dan alat kesehatan yang berbahaya maupun tidak efektif membanjiri pasar. Mereka mengklaim bahwa tanpa proses persetujuan yang diwajibkan oleh FDA, masyarakat tidak akan memiliki cara untuk mengetahui apakah suatu obat atau alat kesehatan aman dan/atau efektif. Meskipun, sebagaimana akan saya bahas di bawah, terdapat cara-cara non-pemerintah untuk melindungi diri dari obat-obatan yang berbahaya atau tidak efektif, memang benar bahwa penghapusan FDA beserta regulasi yang ditegakkannya, betapapun menghambat dan tidak memadainya regulasi tersebut (lagipula, FDA sendiri telah menyetujui cukup banyak obat dan alat kesehatan yang kemudian terbukti berpotensi membahayakan, misalnya implan payudara yang telah disebutkan sebelumnya), dapat membuat pasar layanan kesehatan menjadi lebih berisiko bagi konsumen. Namun, sebagaimana dalam kasus penghapusan sistem perizinan profesi, mereka yang menginginkan masyarakat yang lebih bebas bersedia menerima peningkatan risiko tersebut, karena sebagai imbalannya tersedia pilihan layanan kesehatan yang jauh lebih beragam dalam pasar yang bebas.

Aktivitas-aktivitas swasta yang sama seperti yang membantu masyarakat menghindari dokter yang buruk maupun VCR yang berkualitas rendah, juga dapat melindungi mereka dari obat-obatan yang buruk. Mempertimbangkan pengalaman orang lain dalam menggunakan suatu obat serta berkonsultasi dengan lembaga-lembaga penyedia informasi akan sama efektifnya di pasar obat-obatan seperti halnya di pasar penyedia layanan kesehatan. Saat ini telah ada berbagai organisasi swadaya, organisasi mutual aid, serta pusat-pusat informasi yang menyediakan keterangan mengenai berbagai masalah kesehatan dan cara penanganannya. Deregulasi terhadap obat-obatan maupun sektor layanan kesehatan secara keseluruhan hanya akan mendorong lahirnya lebih banyak organisasi semacam itu. Selain itu, terdapat pula sebuah buletin bernama *Pills-a-go-go* yang menyediakan informasi mengenai obat-obatan bagi para konsumen. Di samping itu, kelompok-kelompok swasta yang aktif secara sosial, seperti *Citizen's Commission on Human Rights*, yang berperan penting dalam memperingatkan masyarakat mengenai potensi bahaya *Prozac*, dapat dan akan terus berfungsi sebagai pengawas independen di pasar.

Demi Kebebasan Memilih dalam Layanan Kesehatan

Selain regulasi-regulasi yang telah dibahas sebelumnya, negara juga mengatur hampir setiap aspek lain dari penyediaan layanan kesehatan, seperti rumah sakit, klinik, rumah perawatan *(hospice)*, apotek, periklanan obat, pelabelan obat, dan sebagainya. Seperti halnya undang-undang mengenai obat-obatan dan perizinan profesi, aturan-aturan ini pada akhirnya hanya membatasi pilihan para pengguna layanan kesehatan serta memaksa kita bergantung pada tenaga kesehatan, obat-obatan, dan lembaga-lembaga yang telah disetujui negara. Meskipun banyak orang menerima atau bahkan mendukung keadaan ini, terdapat beberapa tanda yang memberi harapan bahwa mulai muncul penolakan terhadap status quo tersebut.

Pada awal tahun 1970-an di Chicago, ketika aborsi masih dinyatakan ilegal, sekelompok orang yang dikenal sebagai *Jane Collective* menyediakan layanan aborsi yang murah, aman, dan efektif secara ilegal, sehingga sepenuhnya berada di luar kendali negara. Keberadaan mereka disebarluaskan melalui jaringan pribadi, dan mereka memberikan layanan tanpa melibatkan tenaga kesehatan yang memiliki izin dari negara maupun pendanaan pemerintah. Selain *Jane Collective*, gerakan kesehatan swadaya perempuan *(women's self-help health movement)*, yang belakangan kembali menguat akibat ancaman terhadap legalitas aborsi, mendorong berdirinya klinik-klinik kesehatan perempuan yang dikelola secara mandiri. Di tempat-tempat tersebut, orang-orang diajarkan teknik-teknik alternatif untuk melakukan aborsi, seperti *"menstrual extraction"* (ekstraksi menstruasi), sekaligus disebarluaskan informasi mengenai penggunaan tanaman herbal yang dapat memicu aborsi *(herbal abortifacients)*. Semua ini merupakan contoh bagaimana orang-orang dapat merawat tubuh mereka sendiri tanpa berada di bawah pengawasan pemerintah.

Gerakan swadaya dan aktivisme yang berkembang di sekitar isu AIDS juga telah mengambil pendekatan yang menolak campur tangan pemerintah, sekaligus bergerak di luar kerangka negara dalam beberapa bidang. Selain berhasil mendorong perubahan penting, meskipun masih terbatas, terhadap peraturan FDA sehingga obat-obatan yang dapat memperpanjang hidup lebih cepat tersedia bagi masyarakat, para aktivis AIDS juga mendirikan buyer's clubs, yaitu kelompok yang mengimpor obat-obatan dari negara-negara yang memiliki regulasi obat lebih longgar. Banyak aktivis juga menentang regulasi pemerintah mengenai alat kesehatan dengan membagikan jarum suntik steril secara ilegal kepada para pengguna narkoba suntik. Orang-orang yang hidup dengan AIDS, maupun siapa pun yang membutuhkan layanan kesehatan, akan jauh lebih diuntungkan oleh upaya-upaya semacam ini daripada oleh perluasan peran pemerintah dalam bidang kesehatan yang didukung oleh banyak aktivis AIDS.

Layanan kesehatan kita, sebagaimana setiap aspek lain dalam kehidupan kita, seharusnya berada di bawah kendali kita sendiri, bebas dari pengawasan maupun campur tangan pemerintah. Akan tetapi, kebebasan juga membawa tanggung jawab untuk menjaga diri sendiri dan mengandalkan diri kita sendiri serta orang-orang di sekitar kita dalam memperoleh informasi yang diperlukan agar dapat mengambil keputusan yang tepat. Tanpa campur tangan pemerintah, mungkin saja kita mengambil keputusan yang keliru. Namun, itulah harga yang harus dibayar untuk menjadi bebas. Dan harga itu layak dibayar.

Mentalitas Regulasi dalam Praktik: Rabies dan Birokratisasi Kucing

Jim Baker

Salah satu gambaran yang sangat jelas mengenai berlebihan dan tidak masuk akalnya regulasi pemerintah baru-baru ini muncul dalam sebuah artikel (beserta tajuk rencananya) di surat kabar *Patriot Ledger* yang terbit di Quincy, Massachusetts. Persoalannya adalah penyebaran rabies dari satwa liar kepada kucing peliharaan, serta bagaimana pemerintah menanggapi masalah tersebut. Menurut artikel itu, telah terjadi "wabah" berbagai jenis rabies pada satwa liar yang menyebar dari kawasan Mid-Atlantic ke arah utara sejak tahun 1970-an. Disebutkan pula bahwa wabah ini bersifat berkala, muncul dalam siklus enam tahunan, dan menyerang rubah, rakun, serta kelelawar. Menurut artikel tersebut, satu kali wabah dapat memengaruhi sekitar "2.000 hingga 5.000" hewan di Massachusetts, meskipun tidak dijelaskan apakah angka itu merupakan perkiraan jumlah seluruh hewan yang terdampak, baik liar maupun jinak, atau hanya jumlah kasus yang berhasil diamati.

Data dari Negara Bagian New York menunjukkan peningkatan yang sangat tajam dalam jumlah kasus rabies yang terdeteksi, dari 54 kasus pada tahun 1989 menjadi 1.030 kasus pada tahun 1991. Namun, dari jumlah kasus pada tahun 1991 tersebut, hanya 15 yang merupakan kucing. Jika perkiraan bahwa terdapat satu juta kucing peliharaan di Massachusetts juga mencerminkan keadaan di New York, maka setidaknya terdapat jumlah kucing yang serupa di sana, sementara hanya 15 ekor yang ditemukan mengidap rabies. Situasi ini jelas merupakan alasan yang cukup untuk menyarankan agar para pemilik kucing mempertimbangkan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan mereka, tetapi sama sekali tidak membenarkan langkah yang langsung diambil oleh para birokrat, yaitu mewajibkan registrasi dan vaksinasi semua kucing di seluruh Persemakmuran Massachusetts. Serahkan saja kepada negara untuk menemukan alasan agar para "pemilik" kucing tidak hanya diwajibkan membayar vaksin tersebut (sekitar 20 hingga 35 dolar untuk setiap suntikan), tetapi juga dipaksa mendaftarkan seluruh kucing mereka, lengkap dengan biaya administrasi, tanda pengenal, dan tumpukan dokumen resmi yang begitu digemari oleh para pejabat dari segala jenis.

Hal yang paling mencolok, yang juga disebutkan dalam artikel surat kabar tersebut, adalah bahwa wabah rabies ini pada dasarnya hampir tidak menimbulkan ancaman bagi manusia. Artikel itu menyatakan, *"Tidak ada kematian manusia yang diakibatkan oleh rabies selama wabah ini berlangsung. Selain satu kasus pada tahun 1983 ketika virus rabies tertular di Nigeria, kasus rabies terakhir pada manusia di Massachusetts tercatat pada tahun 1934."* Namun demikian, Departemen Kesehatan Publik tetap mengajukan rancangan undang-undang yang bersifat mencampuri urusan pribadi sekaligus membebani masyarakat. Padahal, sekadar menginformasikan bahaya rabies bagi kucing dan menganjurkan para pemiliknya untuk memanfaatkan layanan vaksinasi di dokter hewan masing-masing sudah lebih dari cukup.

Artikel tersebut juga mengutip pernyataan para pejabat yang mengatakan bahwa "menegakkan undang-undang semacam ini akan sulit." Akan tetapi, justru itulah yang diinginkan para pejabat. Regulasi yang "sulit" ditegakkan memungkinkan penerapannya dilakukan secara selektif dan sewenang-wenang terhadap orang-orang tertentu sehingga memberikan efek gangguan yang sebesar-besarnya, sementara pelanggaran lain diabaikan begitu saja. Ketimpangan dalam penegakan hukum kemudian dibenarkan dengan alasan bahwa undang-undang tersebut memang sulit diterapkan, padahal kesulitan itu sendiri merupakan konsekuensi yang sengaja diciptakan oleh aturan yang tidak masuk akal dan tidak diperlukan. Ini hanyalah salah satu contoh paling terang dari upaya negara memaksa kita melakukan sesuatu yang diklaim "demi kebaikan kita sendiri", padahal pada kenyataannya hanya memperkuat penindasan melalui regulasi yang terus meningkat di negara ini.

Lebih Sedikit Undang-undang, Lebih Banyak Perumahan

Joe Peacott

Pendahuluan

Sebagaimana dikemukakan Jim Baker dalam artikelnya, bidang lain di mana regulasi negara justru merugikan mereka yang konon hendak dilindunginya adalah sektor perumahan. Mulai dari standar bangunan *(building codes)*, komisi pelestarian bangunan bersejarah *(landmark commissions)*, peraturan zonasi (zoning laws), hingga pengendalian sewa *(rent control)*, berbagai aturan dan regulasi yang diberlakukan oleh pemerintah, mulai dari tingkat federal hingga pemerintah daerah, telah mendistorsi pasar perumahan. Akibatnya, jumlah tunawisma meningkat secara drastis, banyak orang miskin yang masih memiliki tempat tinggal terpaksa hidup dalam kondisi perumahan yang memprihatinkan, dan mereka yang sebenarnya mampu memperoleh tempat tinggal yang lebih layak justru harus membayar sewa yang sangat mahal. Sementara banyak orang berpendapat bahwa solusi atas persoalan kekurangan perumahan adalah memperluas pengawasan pemerintah serta meningkatkan pembiayaan negara di sektor ini, saya akan menunjukkan dalam artikel ini bahwa campur tangan pemerintah dalam pasar perumahan justru menciptakan semakin banyak persoalan bagi mereka yang kesulitan memperoleh tempat tinggal. Membebaskan diri dari campur tangan pemerintah dalam kehidupan kita merupakan cara terbaik agar masyarakat dapat menyelesaikan sendiri persoalan tunawisma maupun buruknya kondisi perumahan.

Hak Milik dan Tunawisma

Selama sepuluh tahun terakhir, jumlah tunawisma di Amerika Serikat meningkat secara tajam, meskipun Sensus Penduduk tahun 1990 memperkirakan terdapat sekitar 10,3 juta unit rumah kosong di seluruh negeri, dan sekitar 500.000 di antaranya dimiliki oleh pemerintah. Pada saat yang sama, kualitas tempat tinggal yang dihuni banyak orang miskin terus mengalami kemerosotan. Kompleks perumahan umum *(public housing projects)*, yang banyak di antaranya kotor, tidak terawat, dan sangat tidak aman, berada pada kondisi yang paling buruk. Sementara itu, mereka yang mampu menyewa tempat tinggal yang layak memang dapat menikmati kondisi hidup yang lebih baik, tetapi sering kali harus membayar biaya sewa yang sangat tinggi. Apa yang menyebabkan keadaan seperti ini?

Akar persoalan perumahan terletak pada kepemilikan tanah dan bangunan oleh pihak yang tidak menempatinya *(absentee ownership)*. Di negara ini, seseorang diperbolehkan memiliki hak atas tanah dan bangunan yang sama sekali tidak ditempati maupun digunakannya, lalu menarik uang

sewa dari orang-orang yang seharusnya menjadi pemilik sebenarnya, yaitu mereka yang benar-benar tinggal atau bekerja di atas tanah maupun di dalam bangunan tersebut. Hak atas kepemilikan properti oleh pihak yang tidak menempatinya ini dilindungi oleh pemerintah. Negara mengakui hak kepemilikan yang tidak adil tersebut dan menggunakan kepolisian serta pengadilan untuk menegakkannya melalui undang-undang mengenai pelanggaran masuk ke properti *(trespassing laws)*. Sebagai contoh, penyewa yang selalu membayar sewa tepat waktu dan tidak menimbulkan gangguan terhadap properti maupun tetangganya tetap dapat diusir dari rumahnya hanya karena properti tersebut dibeli oleh pemilik baru yang ingin menutupnya atau mengubahnya sedemikian rupa sehingga akan lebih menguntungkan apabila para penyewa lama dipaksa keluar. Sebagian orang berusaha menentang undang-undang mengenai pelanggaran masuk ke properti dengan menduduki *(squatting)* atau mengklaim bangunan kosong yang tidak digunakan *(homesteading)* di berbagai kota di seluruh Amerika Serikat, lalu memperbaikinya agar menjadi tempat tinggal yang layak. Akan tetapi, mereka biasanya diusir oleh polisi, sering kali setelah menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk membuat bangunan tersebut dapat dihuni. Setelah itu, bangunan tersebut kembali disegel dan dibiarkan kosong serta tidak dimanfaatkan. Dengan cara inilah pemerintah melindungi kepentingan para pemilik tanah yang tidak menempati propertinya sendiri, sekaligus secara aktif menghalangi masyarakat menyediakan tempat tinggal bagi diri mereka sendiri.

Kepemilikan properti oleh pihak yang tidak menempatinya juga sering kali mengakibatkan buruknya kualitas tempat tinggal bagi orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas dan tinggal di bangunan milik orang lain yang hidup di tempat berbeda. Para pemilik rumah kumuh *(slumlords)* pada umumnya tidak pernah merasakan sendiri kondisi tempat tinggal para penyewanya ataupun berhadapan langsung dengan mereka setiap hari. Karena itu, mereka hampir tidak memiliki dorongan untuk memelihara properti yang mereka miliki melebihi standar minimum. Di sisi lain, para penyewa yang tidak memiliki kepentingan ekonomi jangka panjang terhadap tempat tinggal yang tidak diizinkan mereka miliki sendiri, enggan mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan yang seharusnya menjadi kewajiban pemilik sah, yang setiap bulan menerima uang sewa dari mereka. Kedua faktor ini berpadu sehingga menyebabkan banyak properti yang dimiliki oleh pemilik yang tidak menempatinya mengalami kemunduran secara perlahan. Pada akhirnya bangunan-bangunan tersebut ditinggalkan begitu saja dan jumlah tempat tinggal yang tersedia pun semakin berkurang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, setelah pemilik meninggalkan sebuah bangunan, pemerintah justru menghalangi orang-orang yang ingin mengklaim bangunan kosong tersebut untuk memperbaiki dan menempatinya.

Meskipun penghapusan hak untuk memiliki properti yang tidak ditempati maupun digunakan sendiri akan menjadi landasan bagi penyelesaian persoalan perumahan yang dihadapi masyarakat, perubahan semacam itu tidak akan terwujud sebelum terjadi berbagai perubahan mendasar lainnya, terutama penghapusan seluruh bentuk pemerintahan yang mempertahankan pengaturan ekonomi yang tidak adil ini beserta berbagai ketimpangan lainnya. Dengan kenyataan tersebut, kita perlu mencari cara untuk memperbaiki keadaan dalam batas-batas masyarakat yang masih berada di bawah kekuasaan negara. Namun, ketika mencari jalan keluar, banyak orang tetap berpaling kepada pemerintah untuk meminta bantuan, meskipun perlindungan negara terhadap kepemilikan properti oleh pihak yang tidak menempatinya merupakan akar dari hampir seluruh persoalan yang mereka hadapi dalam memperoleh tempat tinggal. Akan tetapi, campur tangan negara di bidang perumahan pada kenyataannya hanya membuat keadaan menjadi semakin buruk.

Bagaimana Standar Bangunan dan Peraturan Zonasi Memengaruhi Perumahan

Salah satu cara pemerintah mengatur sektor perumahan adalah dengan menetapkan standar bangunan yang konon bertujuan melindungi penyewa maupun pembeli agar tidak tinggal di rumah yang tidak aman atau tidak layak huni. Aturan-aturan tersebut mengatur berbagai hal, seperti jenis bahan bangunan yang harus digunakan, ukuran jendela, apakah suatu bangunan boleh ditambah atau diubah, serta jenis penambahan seperti apa yang diperbolehkan. Meskipun dilandasi niat baik, dampak nyata dari peraturan-peraturan ini justru mempersempit ketersediaan perumahan dan turut memperparah masalah tunawisma.

Standar bangunan menghambat inovasi dalam desain maupun konstruksi perumahan, sekaligus membuat biaya pembangunan dan renovasi jauh lebih mahal daripada yang seharusnya. Sebagai contoh, setidaknya ada satu standar bangunan yang mewajibkan penggunaan pipa pembuangan dari tembaga, bahkan hanya jenis tembaga tertentu, dan melarang penggunaan pipa plastik, padahal pipa plastik berfungsi sama baiknya dengan pipa tembaga serta jauh lebih murah untuk dibeli maupun diangkut. Standar bangunan juga membatasi pembangunan yang tidak memperoleh persetujuan dari komisi pelestarian bangunan bersejarah *(landmarks commissions)*, yang di sejumlah kawasan harus memberikan persetujuan atas berbagai perubahan bangunan, baik pada bagian luar maupun bagian dalamnya. Sebagai contoh, di Boston pada tahun sebelumnya, *Haley House*, sebuah lembaga yang melayani para tunawisma, membangun sebuah penutup untuk menghalangi akses ke tangga yang menuju sebuah gang, tempat para tunawisma biasa berkumpul dan yang dianggap mengganggu oleh sebagian warga sekitar. Akan tetapi, *Haley House* kemudian dipaksa membongkar bangunan tersebut, meskipun selain berhasil mengatasi persoalan yang dikeluhkan para tetangganya, bangunan itu juga menyediakan ruang penyimpanan tambahan bagi lembaga tersebut. Alasannya, mereka tidak memperoleh izin mendirikan bangunan terlebih dahulu dan tidak mendapatkan persetujuan sebelumnya dari komisi pelestarian bangunan bersejarah setempat.

Proses memperoleh berbagai persetujuan dan izin yang diperlukan untuk membangun ataupun merenovasi rumah juga sering kali menghambat kegiatan pembangunan itu sendiri. Dalam sebuah artikel di *Libertarian Review*, Bruce Cooley menceritakan pengalaman Patrick Hazel dari California:

"Setelah membeli sebidang tanah, Hazel mendatangi pemerintah daerah untuk mengajukan izin membangun rumahnya sendiri. Di sana ia diberi tahu bahwa sebelum dapat menyerahkan rancangan rumahnya untuk disetujui, ia harus mengisi formulir permohonan, membayar berbagai biaya, menyerahkan 12 salinan rencana tata letak tanah, beberapa salinan akta jaminan (deed of trust), serta beberapa salinan peta survei. 'Saya berkata kepadanya, "Lupakan saja, Charlie. Saya tidak akan menyerahkan diri kepada dua belas lembaga yang berbeda,"' kenang Hazel. Ia kemudian membangun rumahnya tanpa mengurus izin apa pun. Akibatnya, Pemerintah Santa Clara County menjatuhkan tuntutan perdata sekaligus pidana terhadap dirinya. Hazel bersikeras bahwa rumah yang dibangunnya tidak hanya memenuhi, tetapi bahkan melampaui seluruh standar kesehatan, keselamatan, dan konstruksi yang diwajibkan. Menurutnya, yang ia lakukan hanyalah melewati proses yang panjang, mahal, dan 'bertentangan dengan konstitusi, yang sama sekali bukan merupakan bentuk perlindungan.'" Dengan menghambat pembangunan maupun renovasi rumah yang dilakukan secara mandiri, standar bangunan memaksa masyarakat bergantung pada kontraktor yang berpengalaman sekaligus mahal. Akibatnya, biaya pembangunan semakin meningkat, yang pada akhirnya menyebabkan jumlah perumahan berkurang dan harga tempat tinggal menjadi semakin mahal.

Salah satu bidang yang paling dirugikan oleh standar bangunan adalah rumah pemondokan atau hunian satu kamar (*single room occupancy* atau SRO). Secara tradisional, terlepas dari berbagai kekurangannya, SRO merupakan bentuk hunian yang selama ini mencegah banyak orang miskin jatuh ke dalam kondisi tunawisma. Di berbagai kota di seluruh Amerika Serikat, ketika program "pembaruan kota" menghancurkan kawasan pusat kota yang selama ini menjadi lokasi utama SRO, jumlah tunawisma meningkat secara drastis. Sebagai contoh, di Chicago, jumlah SRO menurun hingga 80% antara tahun 1960 dan 1980, yang kemudian turut menyebabkan jumlah tunawisma di kota tersebut meningkat menjadi 2.722 orang pada tahun 1985. Di Boston, kota lain yang juga mengalami pertumbuhan populasi tunawisma, jumlah rumah pemondokan turun dari 9.500 unit pada tahun 1970 menjadi hanya 2.000 unit pada tahun 1991.

Meskipun banyak pemerhati perumahan telah menyadari peran penting SRO dalam mengatasi persoalan tunawisma, standar bangunan sering kali menciptakan hambatan yang nyaris mustahil diatasi oleh mereka yang ingin membangun atau merenovasi bangunan untuk dijadikan SRO. Seorang pengembang di Boston, misalnya, harus menghabiskan waktu tujuh bulan untuk berunding dengan enam lembaga pemerintah kota hanya demi memperoleh izin rumah pemondokan *(lodging house license)*. Sebagaimana ia katakan saat itu: *"Anda tidak akan percaya apa saja yang harus saya lalui untuk mendapatkan izin ini. Sekarang saya memang bisa tersenyum, tetapi proses ini telah menghabiskan sangat banyak uang saya. Sangat banyak uang yang harus dibayarkan kepada Pemerintah Kota Boston, pengacara, konsultan, dan agen pengelola."* Proses yang berbelit-belit seperti ini bukan hanya menghambat pembangunan rumah pemondokan, tetapi juga membuat biaya pembangunan menjadi jauh lebih tinggi, sehingga pada akhirnya harga sewa unit-unit yang berhasil dibangun pun menjadi lebih mahal bagi para penyewanya.

Kelompok regulasi lain yang juga membatasi pembangunan dan merugikan pasar perumahan adalah peraturan zonasi. Aturan-aturan ini menentukan berbagai hal, seperti jenis bangunan apa yang boleh didirikan di suatu kawasan, apakah untuk keperluan komersial, industri, atau perumahan, berapa luas minimum tanah atau bangunan yang harus tersedia untuk setiap unit hunian, serta berapa jumlah unit yang diizinkan dalam satu bangunan. Peraturan-peraturan tersebut pada awalnya dimaksudkan untuk mencegah situasi seperti berdirinya bangunan industri di tengah kawasan permukiman yang tenang dan berbagai keadaan serupa. Namun, pada kenyataannya aturan-aturan tersebut justru memperparah persoalan di pasar perumahan. Sebagaimana standar bangunan, peraturan zonasi meningkatkan harga perumahan sekaligus membatasi jumlah hunian yang tersedia, terutama bagi masyarakat miskin. Lebih jauh lagi, aturan-aturan tersebut juga gagal memberikan manfaat sebagaimana yang dijanjikan, karena orang-orang yang memiliki pengaruh sering kali dapat dengan mudah memperoleh pengecualian zonasi *(zoning variances)* dari para pejabat pemerintah.

Pembatasan zonasi menyebabkan harga rumah di sejumlah wilayah, misalnya di daerah pinggiran kota, menjadi jauh lebih mahal dibandingkan wilayah lain. Salah satu penyebabnya adalah kewajiban menyediakan lahan yang luas di sekitar setiap rumah. Meningkatnya biaya pembelian rumah akibat persyaratan ini menghalangi banyak orang untuk berpindah dari kawasan-kawasan miskin, sehingga menimbulkan kemacetan perumahan *(housing logjam)* di daerah-daerah tersebut. Selain itu, pembatasan jumlah unit yang boleh dibangun dalam suatu bangunan juga menghambat pembangunan maupun renovasi yang sebenarnya dapat menghasilkan lebih banyak apartemen atau bahkan unit-unit SRO. Dampak-dampak dari peraturan zonasi inilah yang turut mendorong meningkatnya jumlah tunawisma di kota-kota.

Banyak orang berpendapat bahwa tanpa standar bangunan dan peraturan zonasi, masyarakat akan tinggal di perumahan yang tidak layak dan lingkungan permukiman akan rusak karena kehadiran berbagai usaha yang tidak diinginkan. Namun, pasar perumahan yang bebas justru akan menyediakan mekanisme yang memadai untuk mengatasi persoalan-persoalan semacam itu. Pasar yang tidak diatur oleh pemerintah akan menghasilkan lebih banyak perumahan, sementara persaingan di antara para pengembang maupun pemilik properti akan mendorong tersedianya tempat tinggal yang lebih murah sekaligus lebih berkualitas. Apabila jumlah perumahan cukup melimpah sehingga seseorang dapat dengan mudah dan murah pindah dari apartemen yang tidak menyenangkan ke tempat lain, atau memiliki banyak pilihan rumah yang terjangkau, maka para pengembang dan pemilik properti akan dipaksa oleh persaingan untuk menawarkan tempat tinggal yang jauh lebih baik daripada yang mereka sediakan saat ini. Selain itu, berbagai kelompok konsumen maupun individu yang menjalankan usaha secara mandiri juga dapat menyediakan informasi dan memberikan saran kepada orang-orang yang sedang mencari tempat tinggal, sehingga mereka dapat memilih pilihan yang paling menguntungkan.

Pasar perumahan yang bebas juga akan menyediakan cara untuk mengatasi sebagian persoalan yang semula hendak diselesaikan melalui peraturan zonasi. Sebagai contoh, kecil kemungkinan sebuah pabrik akan dibangun di tengah jalan permukiman, karena harga tanah atau biaya sewa di kawasan tersebut akan terlalu mahal untuk keperluan industri. Sebaliknya, apabila terdapat suatu usaha yang benar-benar tidak diinginkan oleh masyarakat setempat, usaha tersebut dapat didorong untuk pindah ke lokasi lain melalui boikot, aksi protes, atau berbagai cara nonkoersif lainnya, sebagaimana kadang-kadang juga terjadi saat ini. Semua itu hanyalah sebagian dari sekian banyak cara untuk mengatasi persoalan perumahan tanpa harus bergantung pada aturan dan regulasi pemerintah yang tidak efisien serta justru menimbulkan lebih banyak kerugian.

Kegagalan Pengendalian Sewa

Salah satu bentuk campur tangan pemerintah di bidang perumahan yang paling merugikan, meskipun dilandasi niat baik, adalah pengendalian sewa. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari praktik penetapan sewa yang berlebihan oleh pemilik properti. Namun, di berbagai kota yang menerapkannya, kebijakan tersebut justru menjadi penyebab beberapa krisis kekurangan perumahan yang paling parah di negara itu. Banyak orang yang peduli terhadap penyediaan perumahan bagi tunawisma maupun peningkatan kualitas perumahan secara umum memang enggan mengkritik pengendalian sewa. Akan tetapi, pada kenyataannya kebijakan ini telah merugikan jauh lebih banyak orang daripada yang berhasil dibantunya.

Pengendalian sewa membuat kepemilikan properti sewaan menjadi jauh kurang menguntungkan. Akibatnya, para pemilik lebih cenderung meninggalkan properti mereka, membiarkannya rusak tanpa perawatan, atau bahkan membakarnya demi memperoleh uang pertanggungan asuransi. Selain itu, para pengembang juga enggan membangun unit-unit perumahan baru di kota-kota yang menerapkan pengendalian sewa, karena keuntungan dari investasi mereka menjadi lebih rendah daripada yang mereka harapkan. Dampaknya adalah berkurangnya jumlah unit perumahan, baik yang baru dibangun maupun yang sudah ada.

Para penyewa yang beruntung memperoleh apartemen dengan sewa yang dikendalikan juga sangat enggan meninggalkan tempat tinggal mereka. Rendahnya mobilitas di kalangan sebagian besar penyewa ini (yang di Kota New York mencapai sekitar 30 hingga 40%), semakin memperparah kekurangan perumahan yang telah ada sebelumnya. Akibatnya, harga sewa apartemen lain yang masih mengikuti mekanisme pasar terdorong naik hingga jauh melampaui tingkat harga yang semestinya. Kebijakan pengendalian sewa di New York telah menyebabkan tingkat kekosongan hunian hanya sekitar 2%, sementara sebagian besar apartemen lainnya disewakan dengan harga yang sangat tinggi. Keadaan seperti ini menciptakan kondisi yang sangat mudah mendorong masyarakat miskin jatuh ke dalam situasi tunawisma.

Selain meningkatkan jumlah tunawisma, kebijakan pengendalian sewa sering kali justru menguntungkan orang-orang yang paling tidak membutuhkan bantuan tersebut. Banyak warga kaya di New York tinggal di apartemen dengan sewa yang dikendalikan. Pada tahun 1988, misalnya, ada seseorang yang hanya membayar 1.250 dolar AS per bulan untuk apartemen berisi sepuluh ruangan yang menghadap Central Park. Di Cambridge, Massachusetts, tempat pengendalian sewa menimbulkan dampak yang jauh lebih kecil, bahkan terdapat selebaran yang ditempel di tiang-tiang lampu jalan yang menawarkan hadiah uang tunai bagi siapa pun yang dapat membantu memperoleh apartemen dengan sewa yang dikendalikan. Pertanyaannya, jika seseorang mampu menawarkan hadiah uang demi mendapatkan apartemen murah, mengapa ia tidak mampu menyewa apartemen yang tidak berada di bawah pengendalian sewa? Jawabannya jelas: mereka sebenarnya mampu. Namun, dengan menempati apartemen yang sewanya dikendalikan, mereka justru menghalangi orang lain yang jauh kurang mampu untuk memperoleh tempat tinggal tersebut. Orang-orang yang tunawisma atau terpaksa tinggal di perumahan yang tidak layak sering kali gagal memperoleh tempat tinggal baru semata-mata karena mereka tidak mampu mengumpulkan sejumlah uang sekaligus untuk membayar sewa bulan pertama, sewa bulan terakhir, dan uang jaminan. Orang-orang seperti ini tentu juga tidak sanggup menawarkan hadiah uang demi memperoleh apartemen murah, sehingga mereka tidak mampu bersaing dengan mereka yang memiliki dana lebih besar. Persaingan semacam ini pada akhirnya membuat apartemen dengan sewa yang dikendalikan justru tidak dapat diakses oleh masyarakat miskin, yaitu kelompok yang sebenarnya hendak dibantu oleh kebijakan pengendalian sewa.

Menghapus kebijakan pengendalian sewa memang dapat menyebabkan kenaikan mendadak pada biaya sewa yang harus dibayar oleh sebagian penyewa. Namun, apabila langkah tersebut disertai dengan penghapusan berbagai regulasi lain di pasar perumahan, pasar akan segera kembali mencapai keseimbangan. Orang-orang yang selama ini enggan meninggalkan apartemen dengan sewa yang dikendalikan akan mulai pindah ketika mereka tidak lagi menikmati keuntungan istimewa tersebut. Lebih banyak perumahan baru akan dibangun, dan bangunan-bangunan yang sebelumnya ditinggalkan dapat direnovasi kembali agar layak dihuni. Semua itu akan menambah jumlah unit perumahan yang tersedia, yang pada akhirnya akan menekan kembali biaya sewa. Meskipun para penghuni bekas apartemen dengan sewa yang dikendalikan kini harus membayar lebih mahal (sesuatu yang bagi banyak dari mereka sebenarnya masih sangat terjangkau), sebagian besar masyarakat justru akan membayar sewa yang lebih rendah. Dan ketika biaya sewa menurun serta jumlah perumahan bertambah, jumlah tunawisma pun akan berkurang.

Kesimpulan

Dalam bidang perumahan, sebagaimana dalam hampir semua aspek kehidupan lainnya, campur tangan pemerintah justru menimbulkan lebih banyak persoalan daripada yang berhasil diselesaikannya. Standar bangunan dan peraturan zonasi memperparah kekurangan perumahan. Bahkan, sebagian pejabat pemerintah sendiri mengakui bahwa regulasi dapat menghambat upaya penyediaan tempat tinggal yang lebih banyak. Sebagai contoh, Constance Curry dari Departemen Urusan Warga dan Komunitas di Atlanta, meskipun mengakui bahwa gubuk-gubuk sederhana yang dibangun bagi tunawisma oleh kelompok sukarela *Mad Housers* tidak memenuhi standar bangunan, tetap mengatakan: *"Tidak ada sikap resmi mengenai Mad Housers. Namun, tempat-tempat itu tetap lebih baik daripada tinggal di semak kudzu atau membeku di jalanan. Secara tidak resmi, kami senang mereka menggunakan pendekatan yang begitu kreatif."* Jika para birokrat sendiri secara tidak resmi dapat melihat bahwa cara-cara nonpemerintah mampu membantu mengatasi persoalan perumahan dan tunawisma, mengapa orang-orang di luar pemerintahan tidak dapat melihat hal yang sama?

Pengendalian sewa tidak berhasil. Proyek perumahan yang didanai pemerintah tidak berhasil. Subsidi perumahan pemerintah seperti *Section Eight* juga tidak berhasil. Sudah saatnya mencari cara lain untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat dalam memperoleh tempat tinggal. Mengeluarkan pemerintah dari urusan perumahan beserta seluruh aturan, regulasi, subsidi, dan program-programnya akan memungkinkan terbentuknya pasar yang bebas, yang mampu menyediakan perumahan bagi orang-orang dari berbagai tingkat ekonomi. Memang, menyediakan perumahan secara langsung bagi masyarakat miskin membantu mencegah dan mengurangi tunawisma. Namun, pembangunan perumahan bagi kelompok kaya juga akan membebaskan unit-unit perumahan yang sebelumnya mereka tempati bagi kelompok yang kurang kaya. Selanjutnya, rumah-rumah yang ditinggalkan oleh kelompok tersebut akan tersedia bagi kelas menengah, kemudian bagi kelas menengah bawah, dan seterusnya hingga ke lapisan ekonomi yang paling rendah. Pada akhirnya, proses ini akan memperluas ketersediaan perumahan, bahkan bagi mereka yang saat ini tidak memiliki tempat tinggal.

Membebaskan pasar jelas tidak akan menyelesaikan seluruh persoalan yang ada. Namun, bahkan di dalam masyarakat yang masih berada di bawah kekuasaan negara seperti sekarang, telah muncul berbagai organisasi sukarela yang membantu masyarakat mengatasi persoalan perumahan mereka. Mulai dari *Mad Housers* di Atlanta, hingga dana perwalian perumahan *(housing trust)* yang dinegosiasikan *Local 26* dengan para pemilik hotel di Boston, yang menyediakan dana untuk pembangunan perumahan dan subsidi sewa bagi anggota serikat pekerja, serta berbagai kelompok penghuni liar *(squatters)* di berbagai wilayah negara, semua menunjukkan bahwa masyarakat dapat bertindak atas inisiatif mereka sendiri untuk menyediakan tempat tinggal bagi diri mereka sendiri maupun orang lain tanpa bergantung pada inisiat Inisiatif-inisiatif semacam ini penting bukan hanya karena membantu orang menjalani kehidupan yang lebih baik pada saat ini, tetapi juga karena dapat menjadi pedoman mengenai bagaimana kita kelak dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri dan sesama dalam sebuah masyarakat anarkis masa depan.

Bibliografi

Diterjemahkan dari:
https://theanarchistlibrary.org/library/jim-baker-and-joe-peacott-regulated-to-death

Diposting oleh Front Anti-Penindasan Sidoarjo

Posting Lebih Baru Beranda Posting Lama

Tema PT Keren Sekali. Diberdayakan oleh Blogger.